**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DIVISI PELAYANAN, PEMULIHAN DAN
KESEHATAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**Nurul Anisah
NPM : 147110553**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2020**

PERSEMBAHAN

Dengan bersyukur atas limpahan rahmatMu, segala petunjuk dari Mu menuntunku menuju kejalan Mu. Rasa cinta dan kasih yang tulus selama ini menyertai perjalananku, serta berfikir otakku. Pelajaran berharga dalam hidupku yang akan membuatku selalu tegar hingga membuatku semakin melihat besarnya keagungan Mu.

Sembah sujudku dan seiring syukur padaMu Tuhan

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku kepada orang yang paling aku cintai dan aku sayangi, kepada Ayahku dan Ibuku.....

Tak terbilang rupiah, waktu, tak terhitung jerih payah, tak terhapus cucuran keringat yang mengalir, dan tak ada hentinya untaian do'a yang selalu engkau persembahkan untukku agar aku dapat bersekolah tinggi menggapai impian dan cita-citaku, itu semua takkan pernah terbalaskan.....

Serta untuk semua teman-teman seangkatan Administrasi Publik Angkatan 2014 yang seperjuangan denganku. Terima kasih atas bantuan dan saran dari mu dan selalu menjadi pendengar keluh kesah ku, tanpa kalian aku takkan bisa sampai ke titik ini...

Ini bukanlah akhir dari perjuanganku, tapi ini adalah awal dari kesuksesanku.

Terima kasih untuk semuanya.....

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirroahim.....

Alhamdulillah, segala puji syukur atas segala rahmat, karunia, anugerah, hidayah dan nikmatnya serta kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru”**. Yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliah menuju jaman yang penuh ilmu dan pengetahuan seperti sekarang yang kita rasakan saat ini.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak diberi bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama dari pihak-pihak yang berkompeten demi kesempurnaan penulis sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau beserta Dekan Fisipol yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M.Si selaku ketua Program Studi dan jajaran Dosen pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menyusun proposal ini.
4. Bapak Drs. Zulkifli, M.Si, dan Bapak Drs. Syapril Abdullah, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis terutama dalam proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama dibangku kuliah serta karyawan/I Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah ikut membantu proses kegiatan belajar mengajar di kampus.
6. Bapak dan ibu beserta staf yang berada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pekanbaru yang telah bersedia memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang dibutuhkan dalam penulisan proposal.
7. Kepada Ayahanda Ahmad Yanni dan Ibunda Sariyem serta yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah – mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
8. Untuk abang ku Tengku Indra Syahputra dan kakak ku Eka Sartika Sari yang telah membantu penulis dalam menyusun karya ilmiah ini

dan kawan-kawan seperjuangan terimakasih atas Do'a motivasi segala bantuan dan dukungannya.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibatasi dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin yarobbal alamin.

Penulis menyadari bahwa Usulan Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Aamiin Ya Rabbal' Alamin.

Pekanbaru, 02 Mei 2020
Penulis

Ttd

Nurul Anisah

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Teori Administrasi.....	13
2. Konseo Teori Administrasi Publik.....	15
3. Konsep Teori Organisasi.....	18
4. Konsep Teori Manajemen.....	19
5. Konsep Teori Manajemen Sumber Daya Manusia	22
6. Konsep Teori Evaluasi.....	25
7. Konsep Teori Hak Dasar Anak.....	27

8. Konsep Teori Kebijakan Publik	30
9. Konsep Teori Efisiensi dan Efektifitas	32
10. Hak dan Kewajiban Anak	33
B. Kerangka Pikir	34
C. Hipotesis.....	35
D. Konsep Operasional	35
E. Operasional Variabel.....	37
F. Teknik Pengukuran	39
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel	42
D. Teknik Penarikan Sampel	43
E. Jenis dan Sumber Data	44
F. Teknis Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	46
 BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	47
B. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)	50
1. Profil P2TP2A Kota Pekanbaru	50
2. Visi dan Misi P2TP2A Kota Pekanbaru	51
3. Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi P2TP2A Kota Pekanbaru	52
4. Sumber Daya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	53

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	57
1. Jenis Kelamin	57
2. Tingkat Pendidikan.....	58
3. Tingkat Usia Responden	59
B. Hasil Penelitian	60
1. Efektivitas	61
2. Efisiensi	68
3. Perataan	74
4. Kecukupan	79
C. Hambatan-Hambatan.....	87

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR KEPUSTAKAAN	91
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	93
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Data kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.....	5
I.2 : Data Jumlah Pegawai P2TP2A Kota Pekanbaru	8
II.1 : Konsep Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.	37
III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.	44
III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Peneliti Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	48
IV.I : Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Pekanbaru	51
IV.1 : Sarana dan Prasarana Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	56
V. I : Jenis Kelamin Responden Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) serta Korban tindakan kekerasan tahun 2018	57
V. 2 : Tingkat Pendidikan Responden Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) serta Korban tindakan kekerasan tahun 2018	58
V.3 : Tingkat Umur Responden Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) serta Korban tindakan kekerasan tahun 2018	59

V.4 :	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.....	61
V.5 :	Distribusi Tanggapan Responden Korban Kekerasan 2018 Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	63
V.6 :	Data Sekunder Indikator Efektivitas Dalam Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	67
V.7 :	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Efisiensi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.....	68
V.8 :	Distribusi Tanggapan Responden Korban Kekerasan 2018 Mengenai Indikator Efisiensi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.....	70
V.9 :	Data Sekunder Indikator Efisiensi Dalam Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	73
V.10:	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Pemerataan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.....	74

V.11:	Distribusi Tanggapan Responden Korban Kekerasan 2018 Mengenai Indikator Pemerataan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	76
V.12:	Data Sekunder Indikator Pemerataan Dalam Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	78
V.13:	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.....	80
V.14:	Distribusi Tanggapan Responden Korban Kekerasan 2018 Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	81
V.15:	Data Sekunder Indikator Kecukupan Dalam Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	84
V.16:	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	85
V.17:	Rekapitulasi Tanggapan Responden Korban Kekerasan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.I : Kerangka pikir Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.....	34
II.1 : Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. : Daftar Kuisisioner untuk Responden Pegawai Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Devisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	94
2. : Daftar Kuisisioner untuk Responden Masyarakat Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Devisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.....	105
3. : Daftar Wawancara Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Devisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	116
4. : Daftar Data Sekunder Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Devisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	118
5. : Daftar Data Telly Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Devisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	120
6. : Foto Dokumentasi Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Devisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	122
7. : Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir No 1089/UIR-FS/KPTS/2017 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi An. Nurul Anisah	137
8. : Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Nomor: 54/UIR-FS/KPTS/2020 Tentang Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa	138
9. : Surat Rekomendasi Riset No 287/E-UIR/27-FS/2020 Permohonan Rekomendasi Riset Dari UIR An. Nurul Anisah.....	139

9. : Surat Rekomendasi Riset No 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Pelaksanaan kegiatan Riset An. Nurul Anisah.....	140
10. : Surat Keterangan Penelitian Nomor 071/BPKP-SKP/2020/789 Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Perihal Izin Riset An. Nurul Anisah	141
11 : Surat Keterangan Nomor 177/P2TP2A-KP/2020 Tertanggal 27 Februari 2020 Dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Perihal Riset dan Pengumpulan Data An. Nurul Anisah	142

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Anisah
NPM : 147110553
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S. 1)
Judul Skripsi : Eavaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Mei 2020

Pelaku Pernyataan,

Nurul Anisah

**ABSTRAK EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DIVISI PELAYANAN,
PEMULIHAN DAN KESEHATAN PADA PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

**Oleh
Nurul Anisah**

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Tugas, Divisi Pelayanan;

Penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi dan menjelaskan Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dan Mengetahui hambatan dari Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. Indikator penilaian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru yang digunakan meliputi Efektivitas, Efisiensi, Ketepatan, Kecukupan, Ketepatan, Responsivitas. Tipe penelitian yang berlokasi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang beralamat di jalan Dagang No 78 KP. Tengah, Kec. Sukajadi adalah Survey deskriptif metode kuantitatif yaitu Berangkat dari data, catatan lapangan, observasi, kuisioner, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Populasi berjumlah 7 dan Sampel penelitian ini berjumlah Dua puluh dua orang , Kepala P2TP2A , Kepala Divisi Pelayanan Pemulihan Dan Kesehatan, Pegawai Divisi Pelayanan Pemulihan Dan Kesehatan 5 , Korban tindakan kekerasan tahun 2018 15 orang. Jenis pengumpulan data terdiri dari data primer, data sekunder. Sementara teknis analisa data diperjelas dengan hasil Observasi, kuisioner, wawancara, dokumentasi, data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjelaskan tujuan penelitian, kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan judul peneliti untuk diambil kesimpulan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam kategori Cukup Baik.

**EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF SERVICE, RECOVERY AND
HEALTH DEVELOPMENT DUTIES IN THE INTEGRATED SERVICE
CENTER FOR WOMEN AND CHILD EMPOWERMENT (P2TP2A)
PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

**Oleh
Nurul Anisah**

Keywords: Evaluation, Implementation, Duties, Service Division;

This study aims to evaluate and explain the implementation of the task of service division, recovery and health at the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) Pekanbaru City and to know the obstacles of implementing the task of service, recovery and health division at the Integrated Service Center for Women and Child Empowerment (P2TP2A)) Pekanbaru City. Evaluation indicators for evaluating the implementation of the task of service, recovery and health at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) Pekanbaru City used include effectiveness, efficiency, accuracy, adequacy, accuracy, responsiveness. This type of research located at the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) located at Jalan Dagang No.78 KP.Tengah Kec. Sukajadi is a quantitative method descriptive survey that is Departing from data, field notes, observations, questionnaires, interviews and documentation as tools data collection. The population is 7 and the sample of this research is Twenty-two people, the Head of P2TP2A, the Head of the Division of Recovery and Health Services, the Staff of the Division of Recovery and Health Services 5, victims of violence in 2018, 15 people. Types of data collection consist of primary data, secondary data. While the technical analysis of the data is clarified with the results of observations, questionnaires, interviews, documentation, the data is processed and analyzed to explain the purpose of the study, then compared with theories related to the title of the researcher to conclude that the Evaluation of the Implementation of the Division of Service, Recovery and Health Pekanbaru Center for Integrated Services for Women and Children (P2TP2A) in the Fairly Good category.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi merupakan suatu proses kerja sama, aktivitas dilakukan didalam suatu komponen diawali menetapkan suatu kebijakan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan dengan proses kerja sama dan saling berkaitan dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Dalam pelaksanaan administrasi, organisasi merupakan suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Organisasi merupakan bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing yang bekerjasama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan organisasi dapat tercapai secara selaras dan harmonis maka diperlukan kerjasama dan usaha yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak untuk bersama-sama berusaha saling memenuhi kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab.

Apabila sebuah organisasi supaya tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan maka sudah tentu harus memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan dan menjalankan organisasi, adapun ilmu atau strategi terdapat dalam konsep manajemen, yang mana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendayagunakan dan juga mengoptimalkan bantuan atas kemampuan orang lain

untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sebuah organisasi.

Kebijakan publik dibentuk untuk memecah masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan serta berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.

Dengan berkembangnya Kota Pekanbaru, persoalan yang muncul semakin banyak, dan salah satunya adalah kesenjangan atau ketimpangan hak yang semakin besar dalam pembagian pendapatan antara berbagai golongan pendapatan, antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ini berarti juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat belum berhasil menanggulangi masalah kemiskinan, seperti pengangguran, pekerja anak di bawah umur dan masalah sosial ekonomi lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekerasan yang terjadi pada anak. Berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2013 Pasal 1, pihak yang diberikan kewenangan dalam Perda yang dikeluarkan adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan.

Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, asset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai Negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, di jadikan alat pemuas seks, pekerja anak, di terlantarkan.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan. Komitmen Negara untuk menjamin pemenuhan hak anak pun semakin terlihat saat dikeluarkannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara bukan hanya itu, UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi Negara ini pun mengalami perubahan demi menjamin terpenuhinya hak anak. Hal ini dituangkan dalam pasal 28B Amandemen II yang disahkan pada tahun 2000, yaitu “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Sedangkan Hak Dasar Anak menurut Perda Provinsi menjelaskan bahwa hak dasar anak adalah hak mendasar yang seharusnya diterima anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara berkualitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan,

diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di dalam Peraturan Daerah provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2013 pasal 1 ayat 7 ini juga menjelaskan setiap anak berhak mendapatkan :

1. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
2. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
5. Memperoleh pangan dan gizi yang aman dalam jumlah dan jenis yang cukup sesuai kebutuhannya setiap saat.
6. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
7. Memperoleh perlindungan dari semua bentuk tindak kekerasan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
8. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan social, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, melibatkan dalam perang, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan melibatkan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

Pekanbaru sebagai salah satu kota di Indonesia yang sedang berkembang saat ini dan masih banyak di temukan permasalahan-permasalahan pada anak. Masih banyaknya anak yang bekerja dibawah umur, tingginya perlakuan tindakan

kekerasan pada anak, banyaknya dilakukan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua dikarena tingkat perekonomian yang rendah.

Data kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru tahun 2016-2018

Tabel I.1 : Data Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jenis kasus	Jumlah
1	2016	KDRT	5
2		Kekerasan di sekolah	4
3		Hak asuh anak	2
4		Pencabulan	20
5		Pemeriksaan	8
	Jumlah		34
No	Tahun	Jenis kasus	Jumlah
1	2017	KDRT	7
2		Kekerasan di sekolah	2
3		Hak asuh anak	0
4		Pencabulan	12
5		Pemeriksaan	4
	Jumlah		25
No	Tahun	Jenis kasus	Jumlah
1	2018	KDRT	4
2		Kekerasan di sekolah	15
3		Hak asuh anak	1

4	Pencabulan	22
5	Pemeriksaan	12
	Jumlah	54

Sumber Data : Dokumen Kasus P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa P2TP2A telah mengadvokasi beberapa kasus seperti kasus pencabulan dan perkosaan tahun 2017 yang mana P2TP2A telah membantu untuk memberikan perlindungan hukum yang tepat dan memberikan bantuan pengobatan kepada korban.

Dalam menangani permasalahan pada anak di Kota Pekanbaru, pemerintah masih belum tuntas menjalankan perannya, hal ini terlihat dari adanya anak-anak kecil yang bekerja dibawah umur untuk demi menambah biaya sekolah. Anak-anak kecil seharusnya masih dalam pengawasan dan bimbingan orang tuanya terpaksa bekerja demi menambah pemasukkan untuk membiayai hidup dan sekolah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru maka dikatakan salah satu Divisi yang terdapat dalam P2TP2A adalah Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan yang mana dalam pasal 10 ayat 8 yang berbunyi:

Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan yaitu :

- a. Penanganan masyarakat untuk konsultasi
 1. Menerima masyarakat yang datang untuk konsultasi
 2. Mencatat keluhan dan masalah masyarakat yang datang untuk konsultasi

3. Memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk konsultasi pada divisi dan / atau lembaga terkait
 4. Menyelenggarakan dokumentasi seluruh proses penanganan konsultasi masyarakat
- b. Penanganan korban tindak kekerasan
1. Menerima pengaduan masyarakat dan / atau korban yang datang
 2. Memfasilitasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
 3. Memfasilitasi penjangkauan korban penanganan pengaduan masyarakat
 4. Melakukan identifikasi / menggali masalah yang dihadapi korban
 5. Membuat dokumentasi korban
 6. Mengarahkan dan memfasilitasi penanganan masalah korban
 7. Menyelenggarakan pelayanan tempat tinggal sementara bagi korban
 8. Memfasilitasi dan mendampingi korban untuk tindakan rujukan
 9. Menyelenggarakan fasilitasi dan mendampingi korban untuk tindakan rujukan
 10. Memfasilitasi pemulangan korban ke daerah asal dan lingkungan keluarga

Berdasarkan keputusan walikota pekanbaru Nomor 35 tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, maka dapat diketahui bahwa Visi dan Misi antara lain adalah :

Visi, Misi dan Tujuan :

Sebagaimana lembaga sosial yang dikelola secara professional, P2TP2A mempunyai visi misi dan tujuan sebagai landasan gerakan dalam perjalanan lembaga. Adapun visi, misi dan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Visi

Memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

Sedangkan visi besar dari P2TP2A yakni :

- a. Menjadikan perempuan dan anak Kota Pekanbaru berdaya saing, cerdas, sehat, berakhlakul karimah dan terhindar dari tindak kekerasan.
- b. Mendorong ketahanan keluarga dan komunitas sekitar yang sehat bagi tumbuh kembang anak.

2. Misi

- a. Menjadikan kelembagaan P2TP2A sebagai pusat informasi gender dan anak
- b. Memberikan pelayanan terpadu dan sebagai lembaga mediasi (tempat pelayanan antara) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan serta perlindungan anak.
- d. Menjalin kerjasama kemitraan antara pemerintah, lembaga/organisasi kemasyarakatan dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak.
- e. Membangun mekanisme dialog, komunikasi, dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

3. Tujuan

Tujuan Lembaga ini adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi PUG dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak di kota Pekanbaru.

4. Tugas Pokok

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan sarana pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah atau berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, P2TP2A memiliki struktur organisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah.

5. Fungsi

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai fungsi Memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik (informasi, rujukan, komunitas/konseling, pelatihan ketrampilan. P2TP2A juga menjadi tempat pemberdayaan seperti mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang). P2TP2A bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberdayaan melalui suatu sarana peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Melaksanakan berbagai kegiatan baik berupa penguatan kelembagaan dan forum, maupun kegiatan ilmiah lainnya yang mengarah pada pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mitra kerja yakni, pemerintahan Kota Pekanbaru, Lembaga Swadaya Masyarakat, media,dll.

a. Layanan Advokasi Korban

1. Litigasi : Apabila korban menempuh jalur hukum : medico legal (visum dll), rawat inap, dampingan psikologis dan spiritual selama proses hukum dan rumah aman atau shelter bagi yang membutuhkan.
2. Nonlitigasi : Apabila korban menempuh jalur non hukum : dampingan psikologis dan spiritual dan rumah aman/shelter.

b. Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi

Setelah proses hukum atau pascatrauma, P2TP2A memberikan layanan rehabilitasi dengan membantu anak – anak yang mendapatkan hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak, membantu korban kekerasan anak. Reintegrasi dimaksudkan membantu korban tetap hidup dengan layak secara sosial dan diterima dengan baik di lingkungan tinggalnya.

Dari uraian diatas terlihat ada beberapa fenomena yang mendukung diadakannya penelitian antara lain :

1. Lambatnya pelayanan advokasi terhadap korban tindakan kekerasan terhadap anak karena perlu adanya saksi yang kuat untuk penanganannya, seperti hasil wawancara peneliti dengan korban pencabulan anak berusia 5 tahun, korban tidak berani dan tidak mengetahui dengan jelas kapan dilakukannya pencabulan tersebut, sehingga pegawai P2TP2A mengalami kesulitan dalam melakukan penanganan.
2. Kurangnya tenaga advokasi terhadap anak, yaitu hanya berjumlah 3 orang untuk setiap permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru.

Akibatnya penanganan terhadap korban menjadi lambat dan tidak maksimal.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan tentang:

“Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

- a. Mengevaluasi dan menjelaskan Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.
- b. Mengetahui hambatan dari Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. **Kegunaan Teoritis**, yaitu penelitian ini diharapkan mampu untuk mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi, khususnya dibidang Ilmu Administrasi Publik.
- b. **Kegunaan Praktis**, yaitu diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dalam evaluasi Pelaksanaan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru khususnya pada Divisi Pelayanan Pemulihan dan Kesehatan.
- c. **Kegunaan Akademis**, yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian pada bidang dan kasus yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian serta akan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penulisan ini.

1. Konsep Teori Administrasi

Secara Etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta administrasi yang berarti “pemberi bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan, pengelolaan”.

Menurut Brooks (dalam Wirman 2012;8-9) Administrasi adalah kemampuan mengoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain di dalam suatu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai kesatuan.

Dari penjelasan diatas ditemukan ide pokok sebagai berikut:

1. Administrasi adalah kemampuan untuk memadukan kekuatan-kekuatan sosial didalam suatu organisasi.
2. Kekuatan itu dipadukan dengan maksud agar setiap kekuatan yang ada bergerak sebagai kesatuan/keseluruhann organisme.

Menurut Siagian (2003;2-3), dapat diartikan sebagai keseluruhan kerjasama antar dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada beberapa hal yang terkandung dalam defenisi diatas.

1. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui.
2. Administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuanyang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Kedalam golongan peralatan dan perlengkapan termasuk pula waktu, tempat,peralatan materi serta sarana lainnya.
3. Bahwa administrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.

Menurut Simon (dalam Harbani 2008;2) mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut Dimock (dalam Harbani 2008;3) mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.

Menurut Liang (dalam Harbani 2008;3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerja yang dilakukan oleh sekelompok orang didalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Prajudi (dalam Inu Kencana 2003;4) administrasi adalah suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat organisasi.

Menurut Hadari (dalam Makmur 2007;8) Administrasi adalah rangkaian kegiatan atau proses pengendalian acara atau sistem kerja sama sejumlah orang, agar berlangsung efektifitas dan efisiensi dalam mewujudkan tujuan bersama.

Selanjutnya menurut Siagian (2003;3) tentang unsur-unsur administrasi bahwa unsur-unsur (bagian-bagian yang mutlak) dari administrasi ialah:

1. Dua orang manusia atau lebih
2. Tujuan
3. Tugas yang hendak dilaksanakan
4. Sarana dan prasarana tertentu

Menurut Zulkifli (2009;32) administrasi sebagai proses, aktivitasnya diawali oleh menetapkan suatu kebijakan, dan selanjutnya kebijakan tersebut dilaksanakan melalui proses kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai sasaran atau sejumlah tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

2. Konsep Teori Administrasi Publik

Apakah profesi tertua? Edgar N. Gladen dengan bijaksana mengeluarkan seloroh bahwa *the oldest profession is not prostitution but administrations.*

Masyarakat perlu diatur. Sebelumnya oleh kepercayaan, agama dan tradisi kemudian berkembang menjadi administrasi (publik). Dewasa ini tidaklah mudah mendefinisikan “Administrasi Publik”. Ada tiga alasan pokok. Pertama, karena begitu banyak definisi Administrasi public. Bahkan The Liang Gie (1981), salah seorang pakar Administrasi Publik yang pertama di Indonesia, pada tahun 1970an berhasil menginventarisir 45 definisi Administrasi Publik. Kerumitan semakin bertambah karena istilah ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Public Administrations*, dimana tidak ada kesepakatan atau keunggulan dalam penerjemahan ke bahasa Indonesia. Ada yang tetap menggunakan istilah Administrasi Publik, Administrasi Negara, Administrasi Pemerintahan, bahkan ada yang secara khusus merujuk kepada Birokrasi maupun sebuah “Sistem Politik”. Kamus Inggris-Indonesia yang paling banyak digunakan di Indonesia karya John M. Echols Hassan Shadily, bahkan menerjemahkan

“*Public Administrations*” sebagai “Ilmu Ketataprajaan, Ilmu Usaha Negara, Administrasi Pemerintahan/Negara”. Kedua, walaupun *Public Administrations* “hanya” dianggap sebagai “Ilmu Usaha Negara”, maka urusan “Negara” di hari ini berkembang dibanding “Negara di masa lalu”. Negara bahkan membentuk berbagai Organisasi yang tidak diurus dengan “Cara Negara” saja. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk adanya Badan-badan Usaha Milik Negara (baik yang dikelola Negara maupun bukan oleh Negara), Lembaga-lembaga Kemitraan (*Partnership*) antara Negara dan sektor masyarakat yang berupa *quasi Government Organization*. Kesemuanya menjadikan definisi “Administrasi Negara” ditantang untuk keluar dari khasanah “Administrasi Negara”. Diperlukan memahami makna “Administrasi” bukan sebagai “Administrasi” an sich, namun sebagai sebuah “Management”. (Dalam Riant Nugroho 2014:163)
Perlakuan teori *deterministic* terhadap pengembangan pemikiran

administrasi Negara baru akan lebih tampak pada berubahnya paradigma administrasi Negara menjadi administrasi publik sebagai mana telah banyak ditulis oleh para ahli seperti George Frederickson. Didalam bukunya

Frederickson, menjelaskan pada bab awal, bahwa terdapat lima buah teori tentang publik dalam Administrasi Publik, yaitu :

- 1) Publik sebagai kelompok kepentingan,
- 2) Publik sebagai pemilih rasional,
- 3) Publik sebagai pihak yang diwakili,
- 4) Publik sebagai konsumen, dan
- 5) Publik sebagai Warga Negara.

(Dalam Faried Ali 2015:134).

Definisi Administrasi Publik (Dalam Syafri 2012:18) Merupakan uraian kalimat singkat dan padat yang menggambarkan sesuatu objek tertentu. Karena penggambaran tentang suatu objek, sering kali kita menemukan berpuh atau beratus definisi tentang objek yang sama. Perbedaan definisi dapat terjadi karena hal-hal berikut.

1. Perbedaan Latar Belakang Pendidikan

Seseorang yang berlatar belakang pendidikan ekonomi akan berbeda dengan seseorang yang berlatar belakang sosiologi ketika mendefinisikan pembangunan. Seorang ekonom akan mendefinisikan pembangunan sebagai upaya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara itu, seorang sosiolog mendefinisikan pembangunan sebagai upaya melakukan perubahan kehidupan bermasyarakat kearah yang lebih baik. Substansinya sama, yaitu adanya "Perubahan".

2. Perbedaan Sudut Pandang

Objek tertentu akan tergambaran sesuai sudut pandangnya. Jika seseorang melihat gajah dari arah depan, pendefinisiannya tentang gajah akan berbeda dengan orang lain yang melihat gajah dari bagian belakang.

3. Kemampuan Menggambar objek

Kemampuan orang menggambarkan objek dalam sebuah kalimat singkat dan padat tidaklah sama. Dapat saja orang melihat suatu objek dari sudut yang sama (sesuai melihat gajah dari depan), tetapi kemampuan menggambarkan dalam bentuk definisi dapat berbeda.

4. Tujuan Pendefinisian

Definisi dapat berbeda karena perbedaan kepentingan atau tujuan. Definisi kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) boleh jadi berbeda dengan definisi kemiskinan dari para ahli atau dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

5. Kurun Waktu Pendefinisian

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan pemikiran manusia dan perubahan atau penambahan objek yang didefinisikan karena adanya pergeseran paradigma akibat pergeseran locus dan focus dari ilmu bersangkutan.

3. Konsep Teori Organisasi

Menurut Siagian (2003;6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
2. Organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Menurut Robbins (1994;4) mengatakan organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Irra (2011;10) organisasi adalah kegiatan mengelompokkan dan menyusun kerangka kerja, jalinan hubungan kerjasama di antara para pekerja dalam suatu wadah bagi segenap usaha mencapai tujuan tertentu.

Disamping itu organisasi jugak dipandang sebagai suatu sistem dan bentuk hubungan antara wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dengan cara yang paling

efisien. Pandangan Soedjadi ini jelas bahwa unsur utama sebuah organisasi adalah manusia yang melakukan suatu proses pencarian secara terus-menerus, suatu pemikiran yang tepat dalam metode yang baru untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan dalam rangka mencapai keunggulan yang komperatif.

Prinsip-prinsip organisasi yang dirumuskan oleh Atmosudirjo (1982;91-92)

1. Organisasi itu harus mempunyai tujuan
2. Harus adanya pembagian kerja dan penugasan kerja yang homogen
3. Antara tugas, tanggungjawab, dan kekuasaan (wewenang) harus selalu terdapat kesesuaian serta keseimbangan.
4. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepat-tepatnya dan sejelas-jeleasnya
5. Kesatuan komando atau hirarki
6. Komunikasi
7. Kewajiban pimpinan untuk mengadakan pengecekan terhadap pelaksanaan perintah-perintahnya
8. Kontinuitas
9. Saling asuh antara instansi line atau staf
10. Koordinasi
11. Kehayatan
12. Tahudiri pada setiap organisasi

Menurut Suparto (2012;51) organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerjasama dalam wujud pembagian kerja, guna mencapai suatu tujuan bersama tertentu.

4. Konsep Teori Manajemen

Manajemen secara umum merupakan proses pencapaian tujuan melalui dinamika kerja sama manusia melalui kegiatan orang lain.

Menurut Stoner (dalam Monang 2009;2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya dari suatu organisasi (material, manusia, informasi dan lain-lain) untuk mencapai sasaran.

Menurut Monang (2009;6) mengatakan manajemen adalah proses mengelola sumber daya dan dana secara sistematis, dengan mengoptimalkan fungsi organik manajemen sehingga memberikan manfaat atau nilai bagi umat manusia.

Menurut Winardi (dalam Monang 2009;3) manajemen merupakan sebuah proses khusus, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan (*accuating*), dan tindakan pengawas (*controlling*), yang dilaksanakan untuk mendeterminasi dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lain.

Menurut Liang (dalam Zulkifli 2009;16) mengemukakan bahwa manajemen adalah sebagai suatu proses terdiri atas enam fungsi yaitu:

1. Perencanaan
2. Pembuatan keputusan
3. Pengarahan
4. Pengkoordinasian
5. Pengontrolan
6. Penyempurnaan

Menurut kusnadari, dkk (dalam Dedi Alamsyah 2011;2) mengatakan bahwa manajemen adalah setiap kerjasama dua orang atau lebih guna mencapai tujuan bersama dengan cara seefektif dan seefisien mungkin.

Menurut Haiman (dalam Dedi Alamsyah 2011;2) mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Marry (dalam Susatyo dan Arita 2012;3) mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaannya melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa dalam para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai

tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti tidak melakukan tugas-tugas sendirian.

Menurut Ordway (dalam Susatyo dan Arita 2012;3) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses dan perangkat yang mengarahkan dan membimbing kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam definisi ini menitik beratkan pada proses dan perangkat yang dipergunakan dalam mencapai tujuan suatu organisasi.

Menurut Terry (dalam Susatyo dan Arita 2012;5) mendefinisikan manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling yang penggunaannya secara ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit, ada tiga alasan yang disampaikan oleh Goorgr. R. Terry (dalam Susatyo dan arita 2012;5) mengapa manajemen dibutuhkan :

1. Untuk mencapai tujuan.
2. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.

Menurut Suwatno dan Donni (2011;16) manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Efektif atau tidaknya rentang manajemen dan pengawasan digunakan menurut Koontz et. al. (1989;252) sangat dipengaruhi kondisi faktor-faktor berikut ini:

1. Latihan bawahan
2. Kejelasan dalam pelimpahan wewenang

3. Kejelasan rencana
4. Kejelasan standar-standar tujuan
5. Tingkat perubahan lingkungan yang dihadapi
6. Teknik-teknik komunikasi yang digunakan
7. Jumlah kebutuhan kontak pribadi
8. Kemampuan dan pengalaman manajer

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa tugas utama dari pihak manajemen organisasi dalam menciptakan pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif ada dua macam, yaitu:

1. Menyediakan ketentuan tertulis dari disiplin kerja organisasi
2. Menyediakan alat bantu yang standar untuk mengukur hasil kerja yang telah dicapai maupun untuk kegiatan yang sedang berjalan.

5. Konsep Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2012;10) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2012;21-23) antara lain sebagai berikut:

- a. Perencanaan
Perencanaan (*Human Resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan
- b. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi (*organization chat*)
- c. Pengarahan
Pengarahan (*Directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
- d. Pengendalian
Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

- e. Pengadaan
Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- f. Pengembangan
Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
- g. Kompensasi
Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.
- h. Pengintegrasian
Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.
- i. Pemeliharaan
Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pension.
- j. Kedisiplinan
Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.
- k. Pemberhentian
Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

Manajemen Sumber Daya Manusia yang dijelaskan oleh Simamora (dalam Sutrisno, 2014;5) ialah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.

Menurut Dessler (dalam Sutrisno, 2014;5) manajemen Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian.

Sedangkan Umar (dalam Sutrisno, 2014;7), menjelaskan manajemen Sumber Daya Manusia menurut tugasnya dapat dikelompokkan atas tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi Manajerial: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian
- b. Fungsi Operasional: Pengadaan, Pengembangan, Kompensasi, Pengintegrasian, Pemeliharaan, dan Pemutusan hubungan kerja
- c. Fungsi ketiga ialah kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu
Sementara menurut Schuler *et al.* (dalam Sutrisno, 2014;8), setidaknya

MSDM memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- a. Memperbaiki tingkat produktifitas
- b. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja
- c. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal

Dalam menjalankan fungsi manajemen, seorang manajer dituntut harus mampu mengarahkan, menempatkan, dan mendayagunakan para bawahan atau anggota dalam organisasi agar kinerja dapat terarah dan sistematis. Sehingga, setiap kebijakan yang dirumuskan dalam upaya mencapai tujuan bersama dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Tujuan Manajemen sumber Daya Manusia

Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia (karyawan) terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami bahwa semua kegiatan organisasi dalam mencapai misi dan tujuannya adalah sangat tergantung kepada manusia yang mengelola organisasi itu.

Tujuan ini dapat dijabarkan ke dalam 4 tujuan yang lebih operasional sebagai berikut :

- a. Tujuan masyarakat (*Societal objection*)
Untuk bertanggung jawab secara sosial, dalam hal kebutuhan dan tanggapan – tantangan yang timbul dari masyarakat, suatu organisasi yang berada ditengah – tengah masyarakat diharapkan dapat membawa manfaat atau keuntungan bagi masyarakat. Oleh sebab itu suatu organisasi mempunyai

tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusianya agar tidak mempunyai dampak negative terhadap masyarakat.

- b. Tujuan organisasi (*Organization objective*)
Untuk mengenal bahwa manajemen sumber daya manusia itu ada (*exist*), perlu memberikan kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi secara keseluruhan. Manajemen sumber daya manusia bukanlah suatu tujuan dan akhir suatu proses, melainkan suatu perangkat atau alat untuk membantu tercapainya suatu tujuan organisasi secara keseluruhan.
- c. Tujuan fungsi (*Functional objective*)
Untuk memelihara (*maintain*) kontribusi bagian – bagian lain agar mereka (sumber daya manusia dalam tiap bagian) melaksanakan tugasnya secara optimal. Dengan kata lain setiap sumber daya manusia atau karyawan dalam organisasi itu menjalankan fungsi – fungsinya dengan baik.
- d. Tujuan personel (*Personnel objective*)
Untuk membantu karyawan atau pegawai dalam mencapai tujuan – tujuan pribadinya, dalam rangka pencapaian tujuan organisasinya. Tujuan – tujuan pribadi karyawan seharusnya dipenuhi, dan ini sudah merupakan motivasi dan pemeliharaan (*maintain*) terhadap karyawan itu.

6. Konsep Teori Evaluasi

Evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik.

Menurut Nurcholis (2007;276) Evaluasi adalah proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu kita harus membuat skema umum penilaian dan membuat seperangkat instrument yang meliputi:

1. Input, yaitu masukan yang diperlakukan untuk pelaksanaan kebijakan.
2. Proses, yaitu sebagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Proses disini termasuk didalamnya adalah prosedur mekanisme dan sanksi yang berlaku.
3. Output, yaitu perwujudan nyata atau hasil dari pelaksanaan kebijakan public dan sering diartikan sebagai apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah atau hasil kebijakan yang ditertibkan pada masalah – masalah.
4. Outcome, (dampak) yaitu apakah pelaksanaan suatu kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan atau konsekuensi yang timbul dari suatu kebijakan.

Menurut Anderson (Zaini dan Hafis 2015;86) mengatakan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Menurut Dunn (2013; 610) mengungkapkan kriteria-kriteria evaluasi, adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas adalah Berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
- b. Efisiensi adalah Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
- c. Kecukupan adalah Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan.
- d. Pemerataan / Kesamaan adalah Indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas illegal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan public kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber dalam masyarakat.
- e. Responsivitas adalah Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, profesi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
- f. Ketepatan adalah Kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan

kebijakan tidak berkenaan dengan satuan criteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Secara keseluruhan, Evaluasi Kebijakan memiliki empat fungsi berikut menurut Dunn (Wibawa, Purbokusumo, dan Pramushinto 1994;10).

- a. Eksplanasi
- b. Kepatuhan
- c. Auditing
- d. Akunting

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

Menurut William N. Dunn (2003; 609-610), fungsi-fungsi evaluasi yaitu:

- a. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dapat dicapai
- b. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.
- c. Evaluasi memberikan aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi

7. Konsep Teori Hak Dasar Anak

John Locke (2016 :12) mengemukakan, Hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak yang termasuk anak disini adalah anak usia 0 – 18 tahun, meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12 – 18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak – anak terlantar.

Ada empat Hak dasar anak menurut Seto Mulyadi dari Komnas Perlindungan

Anak :yaitu :

- a. Hak hidup, ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gizi dan rangsangan – rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain – lain. Pelanggarannya seperti aborsi, atau melakukan hal – hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.

- b. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik – baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI , di imunisasi. Dibawa ke Posyandu selain itu secara psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal – hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, di Paudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.
- c. Hak Perlindungan, yaitu seperti dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, dari pelecehan seksual, tindak kriminal, dari pekerjaan layaknya orang dewasa, dan lain sebagainya.
- d. Hak Berpartisipasi / Hak Partisipasi, yaitu setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat, punya suara dalam musyawarah keluarga, punya hak berkeluh kesah atau curhat, memilih pendidikan sesuai minat dan bakat, dan lain-lain.

Tujuan Hak-Hak Anak :

Tujuan Hak-Hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapat informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat.

Sedangkan Konvensi Hak-Hak Anak adalah sebuah perjanjian internasional yang mengakui hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dari anak-anak. Perjanjian ini diadopsi oleh perserikatan bangsa bangsa pada tanggal 20 November 1989.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi Hak-hak anak dan karena itu mempunyai komitmen menurut hukum nasional untuk menghormati, melindungi, mempromosikan, dan memenuhi Hak-hak anak di Indonesia.

Agar terwujud maka pemerintah dari seluruh dunia harus dapat menghormati dan menjunjung tinggi Hak-hak anak, melalui UU yang mereka kembangkan ditingkat nasional. Namun demikian agar anak-anak dapat menikmati Hak-hak mereka secara penuh konvensi itu harus dihormati dan dipromosikan oleh semua anggota masyarakat mulai dari orang tua untuk mendidik, kepada anak-anak sendiri.

Prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak :

Non-diskriminasi dan kesempatan yang sama Semua anak memiliki hak yang sama. Konvensi ini berlaku untuk semua anak, apapun latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin. Tidak peduli dari mana mereka datang atau di mana mereka tinggal, apa pekerjaan orang tua mereka, apakah mereka cacat, atau mereka kaya atau miskin. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya.

Kepentingan terbaik dari anak Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama ketika membuat keputusan yang mungkin berdampak pada anak. Ketika orang dewasa membuat keputusan mereka harus berfikir bagaimana keputusan mereka itu berdampak pada anak-anak.

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak mempunyai hak untuk hidup. Anak harus memperoleh perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosi mereka serta juga perkembangan intelektual, sosial, dan kultural.

Partisipasi Anak mempunyai hak untuk mengekspresikan diri dan didengar. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang

keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan. Berkaitan dengan ini, usia anak, tingkat kematangan, dan kepentingan mereka yang terbaik harus selalu diingat bila mempertimbangan ide atau gagasan anak.

8. Konsep Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional (Dalam Riant 2014:123) disebut sebagai *public policy*. Pertanyaan tentang kebijakan publik adalah pertanyaan *sepanjang masa* karena kebijakan publik tetap ada dan terus ada sepanjang masih ada Negara yang mengatur kehidupan bersama.

Kita ingat beberapa ciri dari Negara, yaitu merdeka atau mempunyai kedaulatan, mempunyai wilayah, mempunyai rakyat, dan mempunyai pemerintahan. Itupun biasanya masih ditambah satu hal lagi yaitu pengakuan dari dunia internasional yang diwakili oleh perserikatan Bangsa-Bangsa. Manusia yang hidup di dalam Negara inilah yang disebut “sebuah kehidupan bersama”, tentu saja dalam lingkup sebuah Negara. Istilah Negara ini kemudian acapkali dipertukarkan dengan “sistem politik”, “sistem social”, “sistem ekonomi”, dan lain-lain. Namun, dalam pemahaman ini, kita sementara menyepakati bahwa kehidupan bersama adalah sebuah kehidupan didalam sebuah Negara. Tentu saja, istilah Negara juga bersifat meluas.

Kita bisa menemukan lebih dari selusin definisi dari kebijakan publik, dan tidak ada dari satu definisi tersebut yang keliru, semuanya benar dan saling melengkapi. Hanya satu hal yang perlu dicatat, beberapa ilmuwan social di Indonesia menggunakan istilah *kebijaksanaan* sebagai kata ganti dari *policy*. Perlu

ditekankan, kebijaksanaan bukanlah kebijakan, karena kebijaksanaan adalah salah satu ciri dari kebijakan publik yang unggul yang akan kita bahas dibagian belakang. Namun, untuk kebutuhan kita sendiri, maka ada baiknya kita merumuskan definisi yang sederhana. Pertama, kebijakan publik terbentuk dari dua kata: kebijakan dan publik.

Menurut James Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public policy Making*, sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang actor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.” Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada. (Dalam Leo 2014:7.

Bentuk – bentuk Kebijakan Publik

Menurut abiding (2004:86 – 100) bahwa kebijakan publik dapat dibedakan dalam beberapa bentuk sebagai berikut :

- a. Berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat (undang – undang peraturan pemerintah, dan keputusan presiden). Sebagai aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat.
- b. Distribusi atau alokasi sumber daya. Kebijakan ditujukan untuk menimbangi berbagai kesenjangan antar golongan dan antar daerah dalam suatu Negara.
- c. Redtribusi atau realokasi. Kebijakan ini merupakan usaha perbaikan kepincangan sebagai akibat kesalahan kebijakan retribusi.
- d. Pembekalan dan pemberdayaan. Kebijakan .ini dimaksudkan untuk memodali atau melengkapi masyarakat dengan sarana – sarana yang perlu agar dapat berdiri sendiri.

9. Konsep Teori Efisien dan Efektifitas

Dua konsepsi utama (Dalam Handoko 2009:7) untuk mengatur prestasi kerja (performance) manajemen adalah efisiensi dan efektifitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan konsep matematik, atau merupakan perhitungan ratio antara keluaran (output) dan masukan (input). Seorang manajer efisien adalah seseorang yang mencapai keluaran yang lebih tinggi (hasil, produktivitas, performance) dibanding masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu) yang digunakan. Dengan kata lain, manajer yang dapat meminimumkan biaya penggunaan sumber daya- sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan disebut manajer yang efisien. Atau sebaliknya, manajer disebut efisiensi bila dapat memaksimalkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas.

Menurut ahli manajemen Peter Drucker efektifitas adalah *melakukan pekerjaan yang benar* (doing the right things), sedang efisiensi adalah *melakukan pekerjaan dengan benar* (doing things right). Bagi para manajer, pertanyaan yang paling penting adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan, dan memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut.¹⁾ Seorang manajer yang bersikeras untuk memproduksi hanya mobil-mobil besar, sedang permintaan masyarakat justru ditujukan pada mobil-mobil kecil adalah manajer yang tidak efektif, walaupun produksi mobil-mobil besar tersebut dilakukan dengan efisien.

10. Hak dan Kewajiban Anak

Jadi Hak Anak Secara garis besar ada 4 yakni Hak untuk:

1. Hidup
2. Tumbuh Kembang
3. Perlindungan
4. Partisipasi

Yang jika diuraikan, akan menghasilkan 31 Hak Anak, sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989.

Mengenai 10 Hak Anak, merupakan bagian dari 31 Hak Anak tetapi diuraikan menjadi 10 dan merupakan Hak Dasar dari Anak (Umum). Sehingga, biasa disebut dengan 10 Hak Dasar Anak, Yaitu :

1. Hak Untuk Gembira
2. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan
3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan
4. Hak Untuk Mendapatkan Nama (identitas diri)
5. Hak Untuk mendapatkan Status Kebangsaan
6. Hak untuk Mendapatkan Makanan
7. Hak Untuk Mendapatkan Kesehatan
8. Hak Untuk Mendapatkan Rekreasi
9. Hak Untuk Mendapatkan Kesamaan
10. Hak Untuk Ikut Serta Dalam Perencanaan Pembangunan.

Selain itu Ada pula Kewajiban Kita sebagai anak yang Harus kita Penuhi agar terjadi Keseimbangan antara keduanya.

Kewajiban Anak Yaitu:

1. Menghormati orang yang lebih tua
2. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
3. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
4. Melaksanakan etika dan akhlak mulia

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variable penelitian beserta indicator-indikator yang terkait di dalam variable penelitian. Kerangka pikiran pada variable penelitian ini tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. Adapun kerangka pikir peneliti dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.1: Kerangka Pikir Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

Sumber: Modifikasi Penulis, 2018

C. Hipotesis

Diduga Pelaksanaan Tugas Pusat Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru, tidak terealisasi dengan baik, karena lambatnya pelayanan advokasi terhadap korban tindakan kekerasan terhadap anak karena perlu adanya saksi yang kuat untuk penanganannya. Kurangnya tenaga advokasi terhadap terhadap anak yang hanya berjumlah 3 orang untuk setiap permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru dengan 12 kecamatan.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengatur variabel tersebut).

Maka, penulis menggambarkan terlebih dahulu mengenai konsep operasional yang berhubungan dengan judul penelitian ini, dimana penulis perlu mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Hak Dasar Anak yang dimaksud disini adalah hak asasi dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan.

3. Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menilai/meninjau kembali Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.
4. Efektivitas adalah Berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya
5. Efisiensi adalah Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
6. Kecukupan adalah Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan.
7. Pemerataan / Kesamaan adalah Indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas illegal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan.
8. Memiliki buku pedoman Perencanaan pembuatan peraturan Divisi Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
9. Pembentukan Program Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan yang dilakukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).
10. Mengikuti pelatihan terkait Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
11. Divisi Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang biayanya efisien
12. Waktu Penyelesaian pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sesuai dengan perencanaan
13. Pemerataan Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
14. Pemerataan jadwal Pelaporan
15. Kecukupan SDM dalam Divisi Pelayanan
16. Sarana dan Prasarana yang mencukupi keseluruhan Pelayanan

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasionalisasi Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala
1	2	3	4	5
Menurut William N. Dunn (2003:610) Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	Efektivitas	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki buku pedoman Perencanaan pembuatan peraturan Divisi Pelayanan, pemulihn dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Pembentukan Program Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan yang dilakukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A). Mengikuti pelatihan terkait Pelayanan, pemulihn dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak 	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>

.Efisiensi	1. Divisi Pelayanan, pemulihn dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang biayanya efisien 2. Waktu Penyelesaian pemulihn dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sesuai dengan perencanaan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
Pemerataan	1. Pemerataan Pelayanan, pemulihn dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. 2. Pemerataan jadwal Pelaporan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
Kecukupan	1. Kecukupan SDM dalam Divisi Pelayanan. 2. Sarana dan Prasarana yang mencukupi keseluruhan Pelayanan.	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Hasil Modifikasi Peneliti, 2020.

F. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap variable penelitian ini menggunakan skala 3 kategori penilaian, yaitu Baik, Cukup Baik, Kurang Baik. Masing-masing pertanyaan diberikan 3 kategori alternative jawaban tersebut, dan setiap jawaban diberi bobot sebagai berikut :\

- a. Baik dengan bobot skor 3
- b. Cukup Baik dengan bobot skor 2
- c. Kurang Baik dengan bobot skor 1

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan ordinal. Menurut Sugiyono (2010:98) adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat *construct* yang diukur.

Adapun pengukuran masing-masing variable Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru 67-100%.

Cukup Baik: Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru 34-66%.

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru 0-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode deskriptif menurut Nawawi (2013;63) ialah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dalam penelitian kuantitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

B. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang beralamat di JL. Dagang No. 78 KP. Tengah kec. Sukajadi. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian, karena terkait dengan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Pada Divisi Pelayanan Pemulihan Dan Kesehatan

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, pada umumnya kita tidak bisa mengadakan penelitian kepada seluruh anggota dari suatu populasi karena terlalu banyak, tentunya akan membuang waktu yang panjang dan tidak efisien. Apa yang bisa kita lakukan adalah mengambil beberapa representatif dan populasi ini yang dimaksud dengan sampel.

Tabel III. 1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi (orang)	Sampel (orang)	
1	Kepala P2TP2A	1	1	100%
2	Kepala Divisi Pelayanan Pemulihan Dan Kesehatan	1	1	100%
3	Pegawai Divisi Pelayanan Pemulihan Dan Kesehatan	5	5	100%
4	Korban tindakan kekerasan tahun 2018	54	15	28%
Jumlah		61	22	36%

Sumber : Data Olahan 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, sebagaimana dipaparkan diatas bahwa penulis memilih responden dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. Menurut Sugiyono (2005 : 29) yang dimaksud dengan responden dalam penelitian adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap.

Dimana Responden penelitian tersebut diatas ditetapkan dengan satu teknik pengambilan sampel diantaranya :

Teknik sensus dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel hal ini dilakukan karena jumlah populasi relatif kecil dan mendukung akan permasalahan penelitian, yaitu Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dan Kepala Divisi Pelayanan Pemulihan Dan Kesehatan serta pegawai

Teknik Insidental Sampling, adalah berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu langsung dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila di pandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiono, 2003:96).

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini maka perlu diketahui sumber data dalam memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara pada pertanyaan yang telah diberikan untuk memperoleh informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru, kemudian pengamatan langsung pada situasi lokasi penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder sebagai data yang memperkuat penelitian ini yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur, dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner

Yaitu dengan membagikan daftar pertanyaan kepada responden dengan maksud agar memperoleh keterangan berdasarkan pilihan alternatif jawaban yang ada

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung, melakukan dialog atau percakapan kepada responden berdasarkan tujuan penyelidikan untuk memperoleh data secara langsung dari responden terkait dengan penelitian ini.

3. Observasi

Yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui hasil pengamatan penelitian dalam melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa dengan metode kuantitatif secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan dengan tabel dan uraian kemudian di analisa selanjutnya diambil kesimpulan.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2018 sampai Maret 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	2018-2020 Bulan dan Minggu Ke																							
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3				4				5				6				7							
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisisioner																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan dan Hasil Laporan																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferehensif skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

C. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak pada titik koordinat $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$ Bujur timur dan $0^{\circ} 25'$ - 0° Lintang Utara. Secara geologi, Kota Pekanbaru keadaannya relatif daerah datar dengan struktur utama pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir dan pengiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan rumus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Dan kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang dari barat ketimur, memiliki beberapa anak sungai seperti Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan, dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur lalu lintas perekonomian.

Ibu Kota Provinsi Riau terletak di Kota Pekanbaru, dan jarak Kota Pekanbaru dari beberapa Kota disekitar Kota Pekanbaru antara lain :

1. Pekanbaru – Taluk = 118 km
2. Pekanbaru – Rengat = 159 km
3. Pekanbaru – Pkl. Kerinci = 33,5 km
4. Pekanbaru – Siak = 74,5 km
5. Pekanbaru –Bangkinang = 51 km
6. Pekanbaru – Ps. Pangaraian = 128 km
7. Pekanbaru – Bagan = 192 km
8. Pekanbaru – Dumai – 125 km
9. Pekanbaru – Selat Panjang = 141 km

Dari keterangan diatas menunjukan jarak antara Kota Pekanbaru dengan beberapa jarak kota lainnya.

Letak Kota Pekanbaru yang sangat strategis dan berpeluang besar untuk menjadikan daerah pemasaran barang hasil penyeludupan, kemudian jika dilihat letak Kota Pekanbaru yang secara Geografis terletak diantara :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Siak.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten pelalawan.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Minas.

Provinsi Riau dengan Pekanbaru sebagai ibu kotanya yang provinsinya dikelilingi oleh laut dan berbatas dengan Negara tetangga, sehingga hal ini memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh organisasi perdagangan gelap internasional, karena kondisi tersebut memudahkan untuk berlangsungnya penyeludupan dan perdagangan gelap mobil – mobilan mewah ke daerah Riau.

Secara administrasi Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Kota Pekanbaru terdiri atas 12 Kecamatan, berikut adalah daftar Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru.

Tabel IV.I : Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Pekanbaru

Kecamatan	Jumlah desa/Kelurahan	Daftar desa/kelurahan
Tampan	9	Tuah Madani, Sidomulyo Barat, Simpang Baru, Air putih, Binawidya, Delima, Sialang Munggu, Tobek Godang, Buah Kayra.
Payung Sekaki	7	Air Hitam, Bardar Raya, Labu Baru Barat, Labuh Baru Timur, Sungai Sibam, Tampan, Tirta Siak.
Bukit Raya	5	Air dingin, Simpang Tiga, Tangkerang Labuai, Tangkerang Selatan, Tangkarang Utara.
Marpoyan Damai	6	Wonoroyo, Tengkarang Barat, Sidomulyo Timur, Maharatu, Perhentian Marpoyan, Tangkerang Tengah.
Lima Puluh	4	Pesisir, Rintis, Tangjung Rhu, Sekip
Rumbai	9	Palas, Umban Sari, Rantau Panjang, Agrowisata, Maharani, Muara fajar Barat, Muara Fajar Timur, Rumbai Bukit, Sri Meranti.
Rumbai Pesisir	8	Lembah Damai, Lembah Sari, Limbungan, Limbungan Baru, Meranti Pandak, Sungai Ambang, Sungai Ukai, Tebing Tinggi Okura.
Sail	3	Cinta Raja, Sukamaju, Sukamulya.
Senapelan	6	Kampung Bandar, Kampung Baru, Kampung Dalam, Padang Bulan, Padang Terubuk, Sago.
Sukajadi	7	Sukajadi, Kedung Sari, Jadirejo, Herjosari, Kampung Melayu, Kampung Tengah, Pulau Karam.
Tenayan Raya	13	Bambu Kuning, Becah Lesung, Industri Tenayan, Kulim, Melebung, Mentangor, Pematang Kapau, Rejosari, Sialang Rampai, Sialang Sakti, Tangkerang Timur, Buah Negeri.
Pekanbaru Kota	6	Simpang Empat, Sumahilang, Tanah Datar, Kota Baru, Sukaramai, Kota Tinggi.

Sumber : Data Olahan Tahun 2019

D. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

1. Profil P2TP2A Kota Pekanbaru

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Pelanggaran ketentuan hukum Negara dan Norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi telah menderai fisik, melukai perasaan atau melantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru. Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan walikota Pekanbaru Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang kegiatannya meliputi :

1. Penanganan pengaduan
2. Pelayanan kesehatan
3. Rehabilitasi sosial
4. Penegakan dan bantuan hukum
5. Pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial
6. Rumah aman (shelter) melalui rujukan secara gratis

Adapun bentuk – bentuk pelayanan P2TP2A Kota Pekanbaru yang meliputi :

1. Pelayanan pemulihan dan Kesehatan.
2. Pendampingan dan Advokasi
3. Pendidikan dan penelitian

4. Penguatan jaringan dan kelembagaan

5. Pendataan dan pelaporan

Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Pekanbaru bersifat layanan satu atap dan mudah diakses. Layanan ini selalu siap menjaga kerahasiaan setiap korban yang terkena kasus kekerasan pada perempuan maupun anak. Pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologi dan hukum, serta pendamping.

2. Visi dan Misi P2TP2A Kota Pekanbaru

Visi P2TP2A Kota Pekanbaru adalah mewujudkan perempuan dan anak di Kota Pekanbaru sebagai warga Negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asusila Manusia.

Misi P2TP2A Kota Pekanbaru adalah :

- a. Memberikan pelayanan bagi yang meliputi informasi, pelayanan, pendampingan psikologis dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak.
- b. Membangunkan gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak.
- c. Sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif.

3. Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi P2TP2A Kota Pekanbaru.

Tujuan umum dibentuknya P2TP2A adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengurusan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu

bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak,

Tujuan khusus dibentuknya P2TP2A adalah :

- a. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkannya.
- b. Mendorong menyediakan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan di berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak meliputi pusat data dan informasi, konseling, terapi psikologis dan medis, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, pusat rujukan, dan sebagainya, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak yang di kelola masyarakat secara mandiri dan sesuaikan dengan hal sebelumnya.
- c. Membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam rangka terbangunnya kerjasama / kemitraan yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A.

Tugas Pokok P2TP2A merupakan sarana pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah atau berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas – tugasnya, P2TP2A memiliki struktur Organisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi focus untuk ditanganin sesuai kebutuhan daerah.

Fungsi dari P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan

berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun nonfisik, yang meliputi data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi, rujukan, konsultasi / konseling. Pelatihan, keterampilan serta kegiatan – kegiatan lainnya.

4. Sumber Daya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) kota Pekanbaru.

Organisasi merupakan suatu penggabungan benda – benda , alat – alat perlengkapan, ruang kerja dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, adapun data asset yang dimiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel IV.1 : Sarana dan Prasarana Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Komputer	2	Unit
2	Printer	1	Unit
3	TV	1	Unit
4	Hendycam	1	Unit
5	AC	1	Unit
6	Meja	6	Unit
7	Kursi	10	Unit
8	Kipas	1	Unit
9	Dispenser	1	Unit
10	Sofa panjang	1	Unit
11	Kasur	1	Unit
12	Lemari	2	Unit

Sumber : Data penelitian 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total sarana dan prasarana di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru berjumlah 28 jenis barang, dan ini tergolong cukup memadai untuk kelangsungan kerja seluruh sumber daya pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sehingga tidak menghalangi dan menghambat kerja para pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk bekerja lebih baik lagi demi kesejahteraan bersama, khususnya dalam mengatasi permasalahan pada perempuan dan anak.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru maka dikatakan salah satu Divisi yang terdapat dalam P2TP2A adalah Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan yang mana dalam pasal 10 ayat 8 yang berbunyi:

Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan yaitu :

- c. Penanganan masyarakat untuk konsultasi
 5. Menerima masyarakat yang datang untuk konsultasi
 6. Mencatat keluhan dan masalah masyarakat yang datang untuk konsultasi
 7. Memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk konsultasi pada divisi dan / atau lembaga terkait
 8. Menyelenggarakan dokumentasi seluruh proses penanganan konsultasi masyarakat
- d. Penanganan korban tindak kekerasan
 11. Menerima pengaduan masyarakat dan / atau korban yang datang
 12. Memfasilitasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
 13. Memfasilitasi penjangkauan korban penanganan pengaduan masyarakat
 14. Melakukan identifikasi / menggali masalah yang dihadapi korban
 15. Membuat dokumentasi korban
 16. Mengarahkan dan memfasilitasi penanganan masalah korban

17. Menyelenggarakan pelayanan tempat tinggal sementara bagi korban
18. Memfasilitasi dan mendampingi korban untuk tindakan rujukan
19. Menyelenggarakan fasilitasi dan mendampingi korban untuk tindakan rujukan
20. Memfasilitasi pemulangan korban ke daerah asal dan lingkungan keluarga

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar Susunan Organisasi Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Berikut ini :

Gambar II.1 : Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Sumber : Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Responden dalam penelitian ini berjumlah 22 orang yang terdiri dari Kepala P2TP2A, Kepala Divisi Pelayanan Pemulihan Dan Kesehatan, Pegawai Divisi Pelayanan Pemulihan Dan Kesehatan, dan Korban tindakan kekerasan tahun 2018. Identitas Responden yang akan diidentifikasi terdiri dari jenis kelamin, tingkat Pendidikan, dan tingkat usia.

1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Jenis Kelamin Responden Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Serta Korban Tindakan Kekerasan Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	10	45%
2	Perempuan	12	55%
Jumlah		22	100%

Sumber : Penelitian Lapangan, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru terdiri dari 10 orang jenis kelamin laki-laki (45%) dan 12 orang jenis kelamin perempuan (55%). Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin dalam penelitian ini di dominasi oleh perempuan yaitu dengan persentase 55%.

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang telah dijalani oleh responden, pendidikan formal dapat berpengaruh terhadap pengetahuan umum atau pengetahuan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga berpengaruh terhadap cara dan waktu dalam memenuhi tanggung jawab. Pada era zaman sekarang pendidikan sangat penting seperti yang telah diumumkan oleh pemerintah wajib belajar 9 tahun, serta melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Maka terlihat tingkat pendidikan responden dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 : Tingkat Pendidikan Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Serta Korban Tindakan Kekerasan Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	5	23%
2	SMP	7	32%
3	SLTA	8	36%
4	Sarjana	2	9%
Jumlah		22	100%

Sumber : Penelitian Lapangan, 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan dari Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) serta Korban tindakan kekerasan tahun 2018 berpendidikan SD 5 orang, SMP 7 orang, SLTA 8 orang dan berpendidikan sarjana 2 orang. Pendidikan seseorang akan menunjang kredibilitas dalam bekerja dan pengetahuan orang tersebut.

Dari tabel di atas maka dapat dikatakan yang penulis tarik menjadi sampel cukup terpelajar sehingga di harapkan dapat memberikan jawaban benar dan berbobot untuk penelitian ini.

3. Tingkat Usia Responden

Usia dapat menjadi ukuran kematangan dan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak. Selain memerlukan orang yang lebih berpengalaman, didalam menjalankan Suatu propesi yang berumur muda yang mempunyai kempuan fisik dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Dapat dilihat pada tabel tingkat umur Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) serta Korban tindakan kekerasan tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel V.3 : Tingkat Umur Responden Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Serta Korban Tindakan Kekerasan Tahun 2018

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1	20 – 30	10	45%
2	31 – 40	8	34%
3	41 – 50	4	18%
Jumlah		22	100%

Sumber : Penelitian Lapangan, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru yang berada pada usia 20-30 berjumlah 10 orang (45%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 8 orang (34%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 4 orang (18%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden pegawai yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada usia 20-30 tahun.

E. Hasil Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

P2TP2A merupakan wadah kegiatan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, yang dipandang perlu untuk dilindungi dan dibantu agar dapat menyelesaikan masalahnya. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya, P2TP2A pun berupaya untuk mengakomodasi dan memfasilitasi aspirasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru pada penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari empat indikator yang meliputi efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan kecukupan, yang mana bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan

Kesehatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Unsur Pegawai Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Pekanbaru yang berjumlah 7 orang terhadap indikator Efektivitas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Divisi pelayanan sudah memiliki buku pedoman perencanaan pembuatan peraturan untuk divisi pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	2	3	2	7
2	Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sudah lama memiliki buku pedoman	1	4	2	7

1	2	3	4	5	6
3	Dalam pembuatan buku pedoman Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melibatkan masyarakat	-	5	2	7
4	Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan yang dilakukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) apakah sudah membentuk sebuah program	-	5	2	7
5	Sudah lama Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan yang dilakukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) membentuk program tersebut	1	4	2	7
6	Program tersebut sudah bisa mengatasi permasalahan perempuan dan anak	1	4	2	7
7	Bentuk pelatihan terkait Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	-	5	2	7
8	Sudah berapa kali pelatihan terkait Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	1	4	2	7
9	Bentuk pelatihan terkait Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	2	3	2	7
Jumlah		8	37	18	63
Rata-rata		1	4	2	7
Persentase		14%	57%	29%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 7 responden pegawai terhadap item yang dinilai dalam indikator Efektivitas, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 14%, cukup baik dengan jumlah persentase 57%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 29%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru dalam indikator Efektivitas sudah cukup baik dengan rata-rata 57%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis terhadap evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Unsur Korban tindakan kekerasan tahun 2018 yang berjumlah 15 orang terhadap indikator Efektivitas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Korban Kekerasan 2018 Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Divisi pelayanan sudah memiliki buku pedoman perencanaan pembuatan peraturan untuk divisi pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada P2TP2A	4	6	5	15
2	Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada Pusat Pelayanan Terpadu P2TP2A sudah lama memiliki buku pedoman	4	6	5	15

1	2	3	4	5	6
3	Dalam pembuatan buku pedoman Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melibatkan masyarakat	4	6	5	15
4	Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan yang dilakukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) apakah sudah membentuk sebuah program	5	5	5	15
5	Sudah lama Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan yang dilakukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) membentuk program tersebut	5	5	5	15
6	Program tersebut sudah bisa mengatasi permasalahan perempuan dan anak	5	5	5	15
7	Bentuk pelatihan terkait Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	5	7	3	15
8	Sudah berapa kali pelatihan terkait Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	5	7	3	15
9	Bentuk pelatihan terkait Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	5	7	3	15
Jumlah		42	54	39	135
Rata-rata		5	6	4	15
Persentase		33%	40%	27%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban dari 15 responden korban kekerasan terhadap item yang dinilai dalam indikator Efektivitas, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 33%, cukup baik dengan jumlah persentase 40%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 27%.

Dari data dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru dalam indikator Efektivitas sudah cukup baik dengan rata-rata 40%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis terhadap evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru.

Sementara itu adapun tanggapan Korban tindakan kekerasan tahun 2018 dari indikator efektivitas dapat dilihat dari hasil wawancara penulis, sebagaimana yang dikatakan oleh Korban tindakan kekerasan 2018 pada saat wawancara yaitu:

“Saya sebagai salah satu korban terhadap kekerasan terhadap perempuan namun kasus saya sangat lambat diatasi ini dikarenakan kasus-kasus yang lain juga ada sehingga bukan saya saja yang diatasinya akan tetapi seharusnya Divisi Pelaynan menabuh lagi SDM yang memiliki kemampuan dalam pelaynan sehingga tidak terjadinya penumpukkan kasus”.

Kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala P2TP2A pada saat wawancara di ruangan kerjanya dengan jawaban yaitu :

“Mengenai buku pedoman Perencanaan pembuatan peraturan Divisi Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang mada dalam buku tersebut telah menjelaskan bagaimana penanganan dalam setiap kasusnya namun yang terjadi adalah bukan tidak adanya buku pedoman tetapi kurangnya SDM dalam mengatasi hal tersebut. Kemudian buku pedoman divisi pelayanan yang telah ada masih kurang diterapkan dalam bekerja sehingga pelayanan yang dilakukan masih kurang maksimal”.

Selanjutnya sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Pemulihan Dan Kesehatan pada saat wawancara di ruangan kerjanya yaitu:

“Upaya Mengikuti pelatihan terkait Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak SDM yang layak mengikuti pelatihan ini mereka telah mengikuti dengan baik dan menerapkan hasil pelatihannya di Divisi pelayanan. Selama ini Divisi Pelayanan Pemulihan dan Kesehatan sudah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik meski adanya kendala-kendala yang terjadi seperti kekurangan SDM dan masih kurangnya diterapkannya Buku pedoman dalam beraktivitas, ini merupakan hal yang harus sama-sama kita perbaiki Bersama. Juklak dan juknis untuk Pelayanan, pemulihn dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak saya melihat sudah cukup baik karna yang saya llihat Divisi pelayan menangani dengan baik sesuai kebutuhan perindividu”.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator efektivitas, peneliti melihat bahwa minimnya sumber daya manusia dalam melayani sehingga kasus terhadap perempuan dan anak menumpuk di setiap harinya tanpa di anvokasikan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. Kemudian perlu adanya peningkatan dalam upaya memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak sehingga para korban yang mengalami permasalahan dapat merasakan perlindungan dan mendapatkan solusi yang dibutuhkan.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam indikator efektifitas sudah cukup baik.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga menyertakan data sekunder sebagai data pendukung yang akan menguatkan dalam pengambilan kesimpulan akhir mengenai kategori penilaian pada indikator efektivitas. Adapun data sekunder tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.6 : Data Sekunder Indikator Efektivitas Dalam Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Item	Jumlah	Keterangan
1	Buku pedoman perencanaan pembuatan peraturan divisi pelayanan	3 buah	Arsip
2	SOP divisi pelayanan, pemulihan dan kesehatan	1 lembar	Terlampir
3	Pelaksanaan program pelayanan pemulihan dan kesehatan	1 kali sebulan	Cukup Terlaksana
4	Dokumentasi pelatihan pelayanan	4 buah	Terlampir

Sumber : Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel diatas mengenai data sekunder indikator efektivitas, dimana dapat dilihat bahwa Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan pada P2TP2A memiliki 3 buah Buku pedoman perencanaan pembuatan peraturan divisi pelayanan, 1 lembar SOP divisi pelayanan, pemulihan dan kesehatan, Pelaksanaan program pelayanan pemulihan dan kesehatan selama 1 kali sebulan, dan Dokumentasi pelatihan pelayanan. Sehingga wajar saja jika evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru dalam indikator keberanian dinyatakan sudah cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara, observasi lapangan oleh peneliti, dan data sekunder yang dikumpulkan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas dalam penelitian evaluasi pelaksanaan tugas divisi pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru, berada pada kategori penilaian “cukup baik” dengan persentase 40%.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan atau perbandingan antara keluaran (output) atau hasil barang dan jasa yang dihasilkan dengan masukan (input) yang langka dalam satuan unit kerja atau ketentuan cara (usaha, kerja) dalam melakukan sesuatu (tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Unsur Pegawai Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Pekanbaru yang berjumlah 7 orang terhadap indikator Efisiensi, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Efisiensi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Siapakah yang menanggung pembiayaan mengenai Divisi Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu P2TP2A	3	3	1	7

1	2	3	4	5	6
2	Masyarakat yang melakukan pembayaran untuk Divisi Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak apakah telah efisien	1	5	1	7
3	Apakah pembayaran ini telah terlaksana secara efektif	2	4	1	7
4	Waktu Penyelesaian pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sesuai dengan rencana	2	4	1	7
5	Waktu Penyelesaian pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sesuai dengan cepat	2	4	1	7
Jumlah		10	20	5	35
Rata-rata		2	4	1	7
Persentase		29%	57%	14%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa jawaban dari 7 responden pegawai P2TP2A terhadap item yang dinilai dalam indikator Efisiensi, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 29%, cukup baik dengan jumlah persentase 57%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 14%.

Dari data dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru dalam indikator Efisiensi sudah cukup baik dengan rata-rata 57%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis terhadap evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Unsur Korban tindakan kekerasan tahun 2018 yang berjumlah 15 orang terhadap indikator Efisiensi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Korban Kekerasan Mengenai Indikator Efisiensi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Siapakah yang menanggung pembiayaan mengenai Divisi Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	5	7	3	15
2	Masyarakat yang melakukan pembayaran untuk Divisi Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak apakah telah efisien	4	7	4	15
3	Apakah pembayaran ini telah terlaksana secara efektif	4	7	4	15
4	Waktu Penyelesaian pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sesuai dengan rencana	5	5	5	15
5	Waktu Penyelesaian pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sesuai dengan cepat	5	5	5	15
Jumlah		23	31	21	75
Rata-rata		5	6	4	15
Persentase		33%	40%	27%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban dari 15 responden korban kekerasan terhadap item yang dinilai dalam indikator Efisiensi, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 33%, cukup baik dengan jumlah persentase 40%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 27%.

Dari data dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru dalam indikator Efisiensi sudah cukup baik dengan rata-rata 40%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis terhadap evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru.

Sementara itu adapun tanggapan Korban tindakan kekerasan tahun 2018 dari indikator efisiensi dapat dilihat dari hasil wawancara penulis, sebagaimana yang dikatakan oleh Korban tindakan kekerasan 2018 pada saat wawancara yaitu:

“Masyarakat yang melakukan pembayaran untuk divisi pelayan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu dan anak yang menurut saya telah efisien”.

Kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala P2TP2A pada saat wawancara di ruangan kerjanya dengan jawaban yaitu :

“Mengenai Divisi Pelayanan, pemulihn dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang biayanya efisien kalau menurut saya biaya yang dikeluarkan dari setiap pelayanan itu sudah cukup baik. Terkait pembayaran yang dilakukan oleh setiap individu yang melakukan pembayaran yang mana sudah efesien”.

Selanjutnya sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Pemulihan Dan Kesehatan pada saat wawancara di ruangan kerjanya yaitu:

“Biaya yang dikeluarkan dalam setiap pelayanan memang sudah dikatakan cukup baik karna jika kita melihat dari pekerjaan divisi

pelayanan yang terkadang mengalami kesulitan. Waktu Penyelesaian pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang mana sudah sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati Bersama. Sejauh ini sebagian masyarakat tidak ada yang komplek terhadap pembayaran yang dilakukan alasan masyarakat yang melakukan komplek tersebut itu terdapat pada masyarakat yang tidak mampu mereka melakukan komplek karna mereka tidak mampu untuk membayar”.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator efisiensi, peneliti melihat bahwa perlu adanya peningkatan efisiensi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan skill individu atau keahlian dari masing-masing individu para pegawai sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin di capai secara maksimal. Kemudian minimnya sumber daya manusia dalam melayani sehingga kasus terhadap perempuan dan anak menumpuk disetiap harinya tanpa di anvokasikan tentang Efisiensi penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam indikator Efisiensi sudah cukup baik.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga menyertakan data sekunder sebagai data pendukung yang akan menguatkan dalam pengambilan kesimpulan akhir mengenai kategori penilaian pada indikator efisiensi. Adapun data sekunder tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.9 : Data Sekunder Indikator Efisiensi Dalam Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Item	Jumlah	Keterangan
1	Alur Pelayanan divisi pelayanan pemulihan dan kesehatan	1 lembar	Terlampir
2	SK SOP tentang pelayanan pengaduan	1 lembar	Arsip
3	Daftar biaya jenis pembayaran divisi pelayanan, pemulihan dan kesehatan	Rp. 150 juta	Arsip

Sumber : Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel diatas mengenai data sekunder indikator Efisiensi, dimana dapat dilihat bahwa Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan pada P2TP2A memiliki 1 lembar Alur Pelayanan divisi pelayanan pemulihan dan kesehatan, 1 lembar SK SOP tentang pelayanan pengaduan, dan Daftar biaya jenis pembayaran divisi pelayanan, pemulihan dan kesehatan senilai Rp 150 juta per bulan. Sehingga wajar saja jika evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru dalam indikator Efisiensi dinyatakan sudah cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara, observasi lapangan oleh peneliti, dan data sekunder yang dikumpulkan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Efisiensi dalam penelitian evaluasi pelaksanaan tugas divisi pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kota Pekanbaru, berada pada kategori penilaian “cukup baik” dengan persentase 40%.

3. Pemerataan

Pemerataan adalah suatu cara untuk menentukan nilai koreksi yang harus diberikan pada hasil pengukuran, sehingga hasil pengukuran memenuhi syarat geometriknnya. Dalam hal ini yang dinilai adalah pemerataan pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemerataan jadwal pelaporan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Unsur Pegawai Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pekanbaru yang berjumlah 7 orang terhadap indikator Pemerataan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.10: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Pemerataan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sudah dilakukan secara merata	1	5	1	7
2	Pelaksanaan Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan Khusus pemberdayaan perempuan dan anak saja	1	4	2	7

1	2	3	4	5	6
3	Jadwal pelaporan selama ini apakah sudah terlaksana secara merata	2	4	1	7
4	Mengetahui seperti apa bentuk pelaporan jadwalnya	2	4	1	7
5	Dalam bentuk apakah jadwal pelaporan tersebut diberikan kepada masyarakat	4	2	1	7
Jumlah		10	19	6	35
Rata-rata		2	4	1	7
Persentase		29%	57%	14%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel dapat diketahui bahwa jawaban dari 7 responden pegawai P2TP2A terhadap item yang dinilai dalam indikator Pemerataan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 29%, cukup baik dengan jumlah persentase 57%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 14%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru dalam indikator Pemerataan sudah cukup baik dengan rata-rata 57%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis terhadap evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Unsur Korban tindakan kekerasan tahun 2018 yang berjumlah 15 orang terhadap indikator Pemerataan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.11: Distribusi Tanggapan Responden Korban Kekerasan Mengenai Indikator Pemerataan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sudah dilakukan secara merata	5	7	3	15
2	Pelaksanaan Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan Khusus pemberdayaan perempuan dan anak saja	4	7	4	15
3	Jadwal pelaporan selama ini apakah sudah terlaksana secara merata	4	7	4	15
4	Mengetahui seperti apa bentuk pelaporan jadwalnya	5	5	5	15
5	Dalam bentuk apakah jadwal pelaporan tersebut diberikan kepada masyarakat	5	5	5	15
Jumlah		23	31	21	75
Rata-rata		5	6	4	15
Persentase		33%	40%	27%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Dari dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 15 responden korban kekerasan terhadap item yang dinilai dalam indikator Pemerataan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 33%, cukup baik dengan jumlah persentase 40%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 27%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A

Kota Pekanbaru dalam indikator Pemerataan sudah cukup baik dengan rata-rata 40%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis terhadap evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru.

Sementara itu adapun tanggapan Korban tindakan kekerasan tahun 2018 dari indikator Pemerataan dapat dilihat dari hasil wawancara penulis, sebagaimana yang dikatakan oleh Korban tindakan kekerasan 2018 pada saat wawancara yaitu:

“Jadwal pelaporan selama ini sudah terlaksana secara merata dengan cukup baik”.

Kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala P2TP2A pada saat wawancara di ruangan kerjanya dengan jawaban yaitu :

“Pemerataan Pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak bisa dikatakan cukup baik karna selama ini saya melihat pelayanan dilakukan dengan rata namun masih terdapatnya pelayanan sistem orang dalam ini tidak bisa di pungkiri masih terjadi meskipun jarang”.

Selanjutnya sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Pemulihan Dan Kesehatan pada saat wawancara di ruangan kerjanya yaitu:

“Jadwal pelaporan selama ini memang sudah terlaksana dengan cukup baik dalam bentuk informasi dan media juga ada. Pemerataan jadwal Pelaporan ini masih berjalan dengan cukup baik. Pemerataan Pembayaran yang mana yang saya melihat terkait pembayaran berdasarkan yang saya amati bahwa tidak ada perbedaan dalam pembayaran semuanya sama”.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Pemerataan, peneliti melihat bahwa perlu adanya peningkatan pemerataan yang lebih baik lagi dalam penjadwalan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih disiplin sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin di capai secara maksimal. Kemudian jadwal pelaporan selama ini juga sudah terlaksana dengan cukup baik

dalam bentuk informasi dan media juga ada. Pemerataan jadwal Pelaporan ini masih berjalan dengan cukup baik. Pemerataan pembayaran yang mana saya lihat terkait pembayaran berdasarkan yang saya amati bahwa tidak ada perbedaan dalam pembayaran semuanya sama.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam indikator Pemerataan sudah cukup baik.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga menyertakan data sekunder sebagai data pendukung yang akan menguatkan dalam pengambilan kesimpulan akhir mengenai kategori penilaian pada indikator Pemerataan. Adapun data sekunder tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.12: Data Sekunder Indikator Pemerataan Dalam Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Item	Jumlah	Keterangan
1	Jasa pelayanan P2TP2A	6 jasa pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian - Rumah sakit - Rumah aman - Psikolog - Penyuluh agama - Pengacara
2	Informasi kepastian waktu jadwal pelaporan pelayanan pemulihan dan kesehatan	2 bentuk	<ul style="list-style-type: none"> - Papan Informasi - Media online
3	Informasi mengenai pemerataan biaya	Banyak dokumen	Arsip

Sumber : Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel diatas mengenai data sekunder indikator Pemerataan, dimana dapat dilihat bahwa Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan pada P2TP2A memiliki 6 jasa pelayanan P2TP2A yaitu kepolisian, rumah sakit, rumah aman, psikolog, penyuluh agama dan pengacara. Kemudian memiliki 2 bentuk informasi kepastian waktu jadwal pelaporan pelayanan pemulihan dan kesehatan yaitu papan informasi dan media online, dan banyak dokumen informasi mengenai pemerataan biaya. Sehingga wajar saja jika evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru dalam indikator Pemerataan dinyatakan sudah cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara, observasi lapangan oleh peneliti, dan data sekunder yang dikumpulkan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Pemerataan dalam penelitian evaluasi pelaksanaan tugas divisi pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru, berada pada kategori penilaian “cukup baik” dengan persentase 40%.

4. Kecukupan

Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Dalam hal ini yang dinilai adalah kecukupan sumber daya manusia dalam divisi pelayanan dan sarana dan prasarana yang mencukupi keseluruhan pelayanan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Unsur Pegawai Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pekanbaru yang berjumlah 7 orang terhadap indikator Kecukupan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.13: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai P2TP2A Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Selama ini Divisi Pelayanan telah memiliki SDM yang cukup	-	-	7	7
2	Seperti apa dalam Divisi Pelayanan apakah sudah melakukan pelayanan dengan baik	1	5	1	7
3	Sarana dan prasarana pelayanan P2TP2A selama ini apakah sudah mencukupi keseluruhan pelayanan	2	4	1	7
4	Pelayanan yang masyarakat terima telah menggunakan sarana dan prasarana yang mencukupi keseluruhan pelayanan	3	4	-	7
5	Sarana dan prasarana yang mencukupi keseluruhan pelayanan tersebut menghabiskan biaya yang berjumlah besar	4	2	1	7
Jumlah		10	15	10	35
Rata-rata		2	3	2	7
Persentase		29%	42%	29%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Dari dari tabel dapat diketahui bahwa jawaban dari 7 responden pegawai P2TP2A terhadap item yang dinilai dalam indikator Kecukupan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan

jumlah persentase 29%, cukup baik dengan jumlah persentase 42%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 29%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru dalam indikator Kecukupan sudah cukup baik dengan rata-rata 42%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis terhadap evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Unsur Korban tindakan kekerasan tahun 2018 yang berjumlah 15 orang terhadap indikator Kecukupan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.14: Distribusi Tanggapan Responden Korban Kekerasan Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Selama ini Divisi Pelayanan telah memiliki SDM yang cukup	-	3	12	15
2	Seperti apa dalam Divisi Pelayanan apakah sudah melakukan pelayanan dengan baik	4	7	4	15
3	Sarana dan prasarana pelayanan P2TP2A selama ini apakah sudah mencukupi keseluruhan pelayanan	4	7	4	15
4	Pelayanan yang masyarakat terima telah menggunakan sarana dan prasarana yang mencukupi keseluruhan pelayanan	5	5	5	15

1	2	3	4	5	6
5	Sarana dan prasarana yang mencukupi keseluruhan pelayanan tersebut menghabiskan biaya yang berjumlah besar	5	5	5	15
Jumlah		18	27	30	75
Rata-rata		4	5	6	15
Persentase		27%	33%	40%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban dari 15 responden korban kekerasan terhadap item yang dinilai dalam indikator Kecukupan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 27%, cukup baik dengan jumlah persentase 33%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 40%.

Dari data dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru dalam indikator Kecukupan kurang baik dengan rata-rata 40%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis terhadap evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru.

Sementara itu adapun tanggapan Korban tindakan kekerasan tahun 2018 dari indikator Kecukupan dapat dilihat dari hasil wawancara penulis, sebagaimana yang dikatakan oleh Korban tindakan kekerasan 2018 pada saat wawancara yaitu:

“Sarana dan prasarana seperti SDM yang ada pada pelayanan P2TP2A saat ini masih dalam keadaan kekurangan dan sangat terbatas”.

Kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala P2TP2A pada saat wawancara di ruangan kerjanya dengan jawaban yaitu :

“Mengenai Kecukupan SDM dalam Divisi Pelayanan sejauh ini SDM adalah salah satu masalah yang sering terjadi karena kekurangan banyak SDM, sementara pengaduan yang dilayani begitu banyak”.

Selanjutnya sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Pemulihan Dan Kesehatan pada saat wawancara di ruangan kerjanya yaitu:

“Untuk sarana dan prasarana yang mencukupi keseluruhan pelayanan masih cukup baik dan butuh penambahan lagi dari segi sarana dan prasarana. Permasalahan yang saya lihat adalah kurangnya SDM dalam pelayanan tersebut sehingga akibatnya kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Kecukupan, peneliti melihat bahwa perlu adanya penambahan tenaga kerja atau sumber daya manusia, karena sarana dan prasarana seperti SDM yang ada pada pelayanan P2TP2A saat ini masih dalam keadaan kekurangan dan sangat terbatas. Dan salah satu masalah yang sering terjadi karena kekurangan banyak SDM, sementara pengaduan yang dilayani begitu banyak, sehingga akibatnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam indikator Kecukupan sudah cukup baik.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga menyertakan data sekunder sebagai data pendukung yang akan menguatkan dalam pengambilan kesimpulan akhir mengenai kategori penilaian pada indikator Kecukupan. Adapun data sekunder tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.15: Data Sekunder Indikator Kecukupan Dalam Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Item	Jumlah	Keterangan
1	SDM dalam divisi pelayanan	3 orang	Aktif
2	Absensi pegawai P2TP2A	1 dokumen	Arsip
3	Fasilitas pelayanan sarana dan prasana divisi pelayanan, pemulihan dan kesehatan	3 macam fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan rujukan - Penanganan mediasi - Pendampingan korban

Sumber : Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel diatas mengenai data sekunder indikator Kecukupan, dimana dapat dilihat bahwa Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan pada P2TP2A memiliki 3 orang SDM dalam divisi pelayanan yang aktif. Kemudian memiliki Absensi pegawai P2TP2A yang update, dan memiliki 3 macam fasilitas pelayanan sarana dan prasana divisi pelayanan, pemulihan dan kesehatan yaitu pelayanan rujukan, penanganan mediasi dan pendampingan korban. Sehingga wajar saja jika evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A Kota Pekanbaru dalam indikator Kecukupan dinyatakan sudah cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara, observasi lapangan oleh peneliti, dan data sekunder yang dikumpulkan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Kecukupan dalam penelitian evaluasi pelaksanaan tugas divisi pelayanan, pemulihan dan kesehatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kota Pekanbaru, berada pada kategori penilaian “cukup baik” dengan persentase 40%.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan mengenai Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada P2TP2A seperti yang tertera di halaman 55, penulis melihat pegawai Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan dalam melakukan penanganan masyarakat untuk konsultasi cukup baik, pegawai menyediakan nomor antrean untuk masyarakat yang ingin melakukan konsultasi, sehingga masyarakat duduk tenang dan rapi sambil menunggu namanya dipanggil sesuai nomor antrean. Akan tetapi, sesekali masih terjadi sistem pelayanan keluarga atau sistem kedekatan dalam segi antrean, yaitu masyarakat yang sudah dari awal datang mengantri untuk konsultasi, masyarakat tersebut menjadi nomor dua, karena keluarga atau teman dekat dari pegawai lebih didahulukan.

Kemudian dalam menerima masyarakat yang datang untuk konsultasi, pegawai juga bersikap sopan dan ramah. Selain itu, pegawai juga mencatat semua keluhan dan masalah masyarakat yang datang untuk konsultasi tersebut. Setelah itu, pegawai memberikan rujukan kepada masyarakat untuk melakukan konsultasi dengan divisi atau lembaga yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi, pegawai tidak memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk konsultasi pada divisi atau lembaga terkait, dan pegawai juga tidak menyelenggarakan dokumentasi seluruh proses penanganan konsultasi masyarakat.

Kemudian dalam melakukan penanganan korban tindak kekerasan, pegawai menerima pengaduan masyarakat atau korban yang datang dengan baik dan aktif. Kemudian pegawai memfasilitasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dan penjangkauan korban penanganan pengaduan masyarakat secara sukarela dan profesional. Setelah itu pegawai melakukan identifikasi / menggali masalah yang sedang dihadapi oleh korban secara intensif dan serius, serta tidak lupa membuat dokumentasi korban guna penyidikan lebih lanjut. Kemudian pegawai juga mengarahkan dan memfasilitasi penanganan masalah korban secara maksimal serta menyelenggarakan pelayanan tempat tinggal sementara bagi korban apabila itu diperlukan.

Selain daripada itu, pegawai juga menyelenggarakan fasilitasi dan mendampingi korban untuk tindakan rujukan apabila korban meminta untuk didampingi. Setelah semua proses penanganan dari awal hingga akhir telah selesai, pegawai memfasilitasi pemulangan korban ke daerah asal dan lingkungan keluarga agar keselamatan korban terjamin sampai ke tempat tujuan. Semua pelayanan yang diberikan oleh Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru tidak dipungut biaya atau gratis.

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari keempat indikator yang digunakan untuk melihat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru, maka dapat dibuat rekapitulasi tanggapan responden.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden pegawai P2TP2A terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai P2TP2A Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	1	4	2	7
2	Efisiensi	2	4	1	7
3	Pemerataan	2	4	1	7
4	Kecukupan	2	3	2	7
Jumlah		7	15	6	28
Rata-rata		2	4	1	7
Persentase		29%	57%	14%	100%

Sumber : Data Olahan, 2020.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden pegawai P2TP2A terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru diatas, untuk kategori penilaian Baik yaitu sebesar 29% (2 responden), untuk kategori penilaian Cukup Baik adalah sebesar 57% (4 responden), dan untuk kategori penilaian Kurang Baik adalah 14% (1 responden), dari total keseluruhan responden pegawai sebanyak 7 orang. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan Cukup Baik Dengan total persentase sebesar 57% (4 responden). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik, artinya semua indikator belum terlaksana dengan baik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Korban Tindakan Kekerasan tahun 2018 terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.17 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Korban Kekerasan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	5	6	4	15
2	Efisiensi	5	6	4	15
3	Pemerataan	5	6	4	15
4	Kecukupan	4	5	6	15
Jumlah		19	23	18	60
Rata-rata		5	6	4	15
Persentase		33%	40%	27%	100%

Sumber : Data Olahan, 2020.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden korban tindakan kekerasan tahun 2018 terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru diatas, untuk kategori penilaian Baik yaitu sebesar 33% (5 responden), untuk kategori penilaian Cukup Baik adalah sebesar 40% (6 responden), dan untuk kategori penilaian Kurang Baik adalah 27% (4 responden), dari total keseluruhan responden korban tindakan kekerasan tahun 2018 sebanyak 15 orang. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan Cukup Baik dengan total persentase sebesar 40% (6 responden). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar

34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik, artinya semua indikator belum terlaksana dengan baik.

F. Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

Kendala-kendala yang menghambat Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru sesuai indikator antara lain :

1. Efektifitas dalam memiliki buku pedoman perencanaan pembuatan peraturan Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, masih adanya SDM yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan buku pedoman.
2. Efisiensi dari segi waktu dalam setiap pelayanan yang mana masih terjadinya sistem pelayanan keluarga atau sistem kedekatan, sehingga mereka yang sudah dari awal datang untuk konsultasi atau menanyakan mereka menjadi nomor dua.
3. Pemerataan jadwal pelaporan yang mana sering terjadinya keterlambatan dalam pelaporan yang dikarenakan kekurangan SDM dalam pelayanan.
4. Kecukupan sumber daya manusia yang kurang memadai, sehingga manajemen perencanaan kurang optimal sampai ke hasil akhir, begitu juga dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga mengakibatkan kinerja yang kurang baik dan kurang maksimal.
- 5.

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai bahwa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru adalah Cukup Baik. Dan mengacu pada hasil kesimpulan utama, berikut adalah kesimpulan secara rinci untuk setiap indikatornya.

Penulis merekap kesimpulan dari 6 indikator yang mana 6 indikator tersebut yaitu Efektivitas, Efisiensi, Pemerataan, Kecukupan, Ketepatan, dan Responsivitas, dari suatu tujuan penelitian yang dapat disimpulkan pada kategori **Cukup Baik**. Dimana Penulis berupaya menganalisis baik dari kuisisioner, wawancara, dan observasi terhadap keenam indikator dinilai **Cukup Baik** dengan jumlah rata-rata 4 dengan persentase 57% unsur Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dan Korban tindakan kekerasan tahun 2018 rata-rata 6 dengan Persentase 40%. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dinilai **Cukup Baik**. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam pelayanan yang lebih baik lagi.

B. Saran

Agar Pelaksanaan Tugas Divisi Pelayanan, Pemulihan Dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dapat lebih dimaksimalkan lagi dimasa mendatang, maka pihak pimpinan sebaiknya dapat :

1. Kepala P2TP2A lebih tegas lagi agar seluruh Divisi Pelayanan Pemulihan dan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi.
2. Kepala Divisi Pelayanan Pemulihan dan Kesehatan agar lebih tegas lagi terhadap bawahannya mengenai pelayanan yang sama rata agar tidak terjadinya pelayanan sistem kekeluargaan.
3. Diharapkan kepada P2TP2A agar dapat melakukan penambahan SDM, agar pelayanan tidak lambat, tidak menumpuk dan dapat selesai dengan cepat dan maksimal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abdul Wahab Solichin, 2012, *Analisis Kebijakan*. Malang: Bumi Aksara.
- Badan Penerbit FISIPOL, 2013, *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Mahasiswa*. Pekanbaru UIR.
- Dewi, Irra Christyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Surabaya: Prestasi Pustaka.
- Dunn, William, N. 2012. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko T. Hani, 1997. *Manajemen (edisi 2)*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta
- Hamim, Sufian, 2003. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru. UIR Press
- Hasibuan, Malayu.S.P 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hariri, Hasan. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Moekijat, 2005. *Pengembangan Organisasi*. Cetakan Ketujuh, Mandar Maju, Bandung
- Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Ngapena, Chafid, 2003, *Dasar-Dasar manajemen kepariwisataan alam*, Libery, Yogyakarta
- Nurcholis, Hanif 2007. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT Gramedia.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya manusia*, Jakarta : Rineka Cipta.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Negara* : Bandung : Alfabeta

Sarwoto. 1999. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Siagian, Sondang P 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksar.

Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Lembaga Penerbit FEUI

Sunyoto, Danang. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Cempaka Putih

Syafiie, Kencana Inu. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Syafri, Wirman. 2003. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga

Wibawa, Samodra dan Purbokusumo, yuyun. Pramushinto, Agus. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widodo, Eko Suparno. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : PT Raja

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.

Dokumentasi :

Undang – Undang Dasar 1945 Nomor 23 Tahun 2002

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak

Keputusan Gubernur Riau Kpts.348 / 2014 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Keputusan walikota pekanbaru Nomor 119 tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.